

Wawasan



Amburadulnya Budaya Politik Kita: Percakapan dengan Manneke Budiman

Nirwansyah

Email: nirwann3456@gmail.com

Manneke Budiman adalah seorang Profesor Kajian Sastra dan Kajian Budaya yang pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Ilmu Susastra di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Ia meraih gelar sarjana (S.S.) Sastra Inggris dari Universitas Indonesia, gelar M.A. bidang Sastra Bandingan dari University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat, dan gelar Ph.D. bidang Kajian Asia dari University of British Columbia, Kanada. Ia juga memperoleh Sertifikat Pascasarjana dalam Kajian Budaya Inggris dari University of Warwick, Inggris. Minat risetnya meliputi kajian media dan subkultur, kajian gender, kajian ingatan (*memory studies*), dan kajian ketahanan komunitas. Ia menjadi anggota dewan redaksi di beberapa jurnal akademik, seperti *Wacana Journal of the Humanities of Indonesia*; *Asian Women* (Korea Selatan); *Paradigma Jurnal Kajian Budaya*; dan *Makara Journal of Human Behavior Studies in Asia*. Ia juga merupakan anggota Dewan Penasihat *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*.

Selain itu, Manneke Budiman merupakan salah satu pendiri dan anggota dari *International Consortium of Mangunegaran and Sustainable Social Transformation*, serta anggota rekan dari *Institute for Trans-Pacific Cultural Research*, Simon Fraser University, Kanada. Ia menjabat sebagai Editor Seri untuk *Engaging Indonesia: Critical Dialogue of Culture and Society* terbitan Springer Nature (bersama Melani Budianta, Abidin Kusno, dan Rita Padawangi). Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Etik Himpunan Sarjana-Kesusasteraan Indonesia (HISKI), Ketua Dewan Penasihat English Studies Association in Indonesia (ESAI), dan Ketua Alumni Katolik Universitas Indonesia (Alumnika UI).

Nirwansyah:

Selamat datang Prof. Manneke Budiman. Terima kasih sudah berkenan datang di MAARIF Institute. Interview ini nantinya akan dipublikasikan di Jurnal MAARIF. Sebelum kita mulai Prof., kalau tidak salah, film favorit Prof. itu adalah "Dead Poet Society". Mungkin bisa diceritakan kenapa film tersebut masuk ke dalam daftar film favorit Prof.?

Manneke Budiman:

Ya, film itu sulit untuk dilupakan karena di situ kita melihat pendidikan anak-anak muda. Orang-orang yang oleh sistem, oleh masyarakat, mau dibentuk menjadi sesuatu yang seragam, cara berpikirnya kolektif, ide-idenya sama, lewat pendisiplinan dan kepatuhan di sekolah tempat mereka berada. Tapi, ini ada satu orang guru sastra yang betul-betul bisa memaksa mereka mengimajinasikan dunia alternatif yang berbeda di mana mereka sebagai orang muda bisa secara sangat liar dan bebas menyatakan apa yang mereka mau. Meskipun kita kemudian melihat bahwa ada risiko yang sangat besar sebagai konsekuensinya.

Nirwansyah:

Terkait budaya politik kita saat ini. Apa kira-kira dua kalimat atau dua kata yang menggambarkan kegelisahan Prof. terkait budaya politik kita saat ini?

Manneke Budiman:

Amburadul, seperti yang sudah terjadi beberapa puluh tahun.

Nirwansyah:

Amburadul, ya. Menurut Prof., apakah masih ada sisa warisan kolonial terkait budaya politik kita saat ini?

Manneke Budiman:

Selalu ada dan ada banyak kajian dan riset tentang itu. Bagaimana kolonialisme yang sekian ratus tahun itu juga membentuk atau mewariskan budaya politik pada era pasca kolonial ini. Tetapi, budaya politik yang dominan yang dilestarikan oleh penguasa-penguasa kita sekarang itu sebetulnya modelnya sudah dibudayakan oleh penguasa-penguasa tradisional di era prakolonial. Kita tidak bisa terus-menerus dan selalu menyalahkan orang asing dalam soal ini.

Nirwansyah:

Dalam kacamata kajian budaya, kira-kira adakah perbedaan antara budaya politik Indonesia dengan budaya politik di belahan negara Asia Tenggara lainnya?

Manneke Budiman:

Secara garis besar, itu sama. Dalam artian, sebab-akibat dan dampak atau pengaruhnya. Kita lihat, Thailand itu sangat-sangat berorientasi pada kerajaan. Filipina, walaupun kelihatannya jauh lebih demokratis, tapi ada tradisi *landlord* atau tuan tanah yang sangat kuat. Dan sistemnya juga feodal. Tokoh-tokoh politik besar sekarang, siapa pun yang jadi presiden, itu pasti adalah tuan-tuan tanah di wilayahnya masing-masing.

Kita tahu Duterte, setelah sebulan dikirim ke ICC Den Haag, tanpa kehadirannya pun masih bisa terpilih sebagai wali kota di kota asalnya di Davao sana. Jadi, masih kurang lebih sama. Saya bahkan curiga, jangan-jangan di Barat pun hal semacam itu juga terjadi dalam bentuk yang lain.

Nirwansyah:

Tapi yang membedakan politik Indonesia sendiri dengan mereka yang di Asia Tenggara lainnya apa itu, Prof.?

Manneke Budiman:

Di kita, politisinya terlalu kreatif. Jadi, bisa bahkan memikirkan hal-hal yang saya tidak mau mengatakan di luar akal sehat, untuk mencari-cari cara bagaimana yang *random-random* itu bisa mereka pungut, lalu dijadikan menjadi bagian dari budaya politik yang menguntungkan mereka.

Nirwansyah:

Jadi, dalam konteks itu, yang waras mereka atau kita yang tidak waras Prof.?

Manneke Budiman:

Saya juga jadi mulai bertanya-tanya tentang kewarasan saya sendiri. Kelihatannya orang-orang yang merasa waras seperti kita makin tidak punya tempat.

Nirwansyah:

Dalam konteks media populer, bagaimana media populer bisa merepresentasikan kekuasaan saat ini? Prof. melihatnya seperti apa?

Manneke Budiman:

Media populer itu selalu menjadi cerminan atau imitasi dari apa yang ada di luar. Jadi, dia menjadi kendaraan yang paling nyaman, yang paling mudah, untuk memasyarakatkan atau mensosialisasikan apa pun yang diinginkan oleh kekuasaan agar bisa diterima oleh lebih banyak orang.

Tetapi, kita selalu masih punya harapan bahwa media populer, entah disadari atau tidak oleh produsernya. Kalau kita lihat lebih dalam ke bawah permukaan, juga mengandung potensi-potensi yang sifatnya subversif terhadap pesan yang dominan yang di atas permukaan. Bukan karena penciptanya itu kritis, tapi dia juga harus peka terhadap pasar. Jadi, cara mengemas suatu ide yang tidak laku tapi karena dari kekuasaan

dominan, adalah dengan cara sedemikian rupa supaya pasar tertarik untuk mengonsumsinya.

Nah, ketika kemudian upaya itu bertemu dengan kehendak pasar, kadang-kadang kreativitas di luar yang diinginkan oleh pencipta kebudayaan dominan atau kekuasaan dominan pun ikut masuk. Sehingga, selalu ada yang namanya budaya populer juga punya potensi untuk kritis di samping meninabobokan.

Nirwansyah:

Iya, tapi tampaknya lebih banyak yang meninabobokan. Apalagi munculnya tren atau pemimpin-pemimpin populis. Kira-kira, kita sebagai konsumen media populer itu sendiri, apa yang mesti kita bangun agar kita tidak terlena oleh pemimpin-pemimpin populer itu?

Manneke Budiman:

Itu pertanyaan satu juta dolar. Karena orang-orang akademisi seperti kami itu, setelah sekitar puluh tahun berhadapan dengan pimpinan-pimpinan yang sangat elite, tiba-tiba melihat seorang pemimpin yang populis, dan kita langsung kesengsem semua. Matimatian membela, *gitu ya*. Dan gagal untuk melihat *simptom-simptom* kecil yang dulu mulai bermunculan.

Nirwansyah:

Misalnya seperti apa itu, Prof.?

Manneke Budiman:

Bahwa ternyata *blusukan* itu bisa *bak* satu pedang dengan dua sisi. Di satu pihak: *“wah sangat mengesankan”*, ada seorang pemimpin yang pertama kali mau masuk *got* (selokan), mau turun ke sana. Tapi, kita juga lupa bertanya: “Apakah ini sungguh-sungguh memang dari diri dia? Atau bagian dari suatu

pencitraan atau strategi politik untuk mencapai kekuasaan yang merusak?”

Nirwansyah:

Kita tidak punya tools untuk mengecek sesuatu ini sungguh-sungguh atau itu sekadar pencitraan ya, Prof.?

Manneke Budiman:

Harusnya punya. Tapi itu dia, karena kehausan dan kerinduan akan pemimpin yang lama ditunggu dan yang tidak elitis, itu mengaburkan mata kami dan juga menumpulkan daya kritis kami, begitu.

Nirwansyah:

Menurut Prof., bagaimana media populer merepresentasikan kekuasaan di Indonesia sejak era Orde Baru hingga sekarang?

Manneke Budiman:

Kita kalau ngomong sinetron sudah hampir *gamblang*, ya. Tapi, katakanlah misalnya olahraga. Bagaimana pertandingan bulu tangkis, pertandingan sepak bola, itu menjadi suatu tontonan atau *spectacle* yang juga sangat masif. Bagi orang yang terlibat menyaksikan dan secara emosional masuk, tiba-tiba suatu peristiwa olahraga juga menjadi suatu peristiwa kebudayaan populer yang masif. Dengan cara itu, orang itu dininabobokan juga. Jadi, kalau kalah, itu akan ada ceritanya supaya orang tidak kemudian berbalik melawan kekuasaan. Kalau menang, ya menjadi semakin memberikan legitimasi kepada kekuasaan.

Tidak usah jauh-jauh. Misal, dengan kehadiran seorang kepala negara di suatu podium kecil di stadion atau dengan menyambut para atletnya sebelum main di istana yang disertai dengan *ngobrol-ngobrol* singkat. Dan ketika rakyat melihat hal itu, maka mereka (rakyat) melihat bahwa pada momen-momen tertentu

ternyata pemimpinnya tidak hanya bicara dan mengurus politik-politik yang berat, tetapi juga memperhatikan hal-hal sederhana lainnya di luar urusan politik. Itu juga merupakan cara membangun populisme dan juga cara untuk menggunakan peristiwa kebudayaan populer untuk menjaga atau menaikkan legitimasi. Dan justru di dalam hal-hal seperti ini, orang sama sekali tidak melihat kaitan antara keduanya apa. Namun ,itu terjadi dan itu sudah dilakukan, menurut saya, bahkan sejak di zaman Sukarno—GANEF (Games of the New Emerging Forces)—sebagai alternatif terhadap Olimpiade. Jadi, orang lapar, tapi karena disuguh tontonan seperti itu, mereka lupa pada laparnya. Padahal, harus antre beras, antre minyak.

Nirwansyah:

Dalam karya sastra atau film, bagaimana kekuasaan negara dibadirkannya? Apakah subversif atau ambivalen? Atau hadir sebagai pelindung? Atau bagaimana, Prof.?

Manneke Budiman:

Semuanya ada. Itu namanya *multi-track*. Semua trek dipakai: yang tersembunyi, yang dibungkus dengan keindahan, yang ambivalen maupun yang terang-terangan. Itu dipakai semua. Dan kebudayaan populer memang menyediakan sarananya. Terakhir ini, yang sekarang sedang main di teater, itu kan film tentang militer, “Believe”. Itu kan heroisme dari suatu peristiwa yang sebetulnya bagi sejarah kita pahit, ya.

Pada saat yang sama, teman-teman akademisi-aktivis membuat forum atau acara agar orang tidak melupakan Timor-Timur. Itu hampir bersamaan waktunya. Ada Profesor Melani Budianta, ada Rita Pandanwangi dari Singapura juga membuat film yang sama “Ingatan Timor Timur”. Film tersebut menyuguhkan narasi alternatif yang cenderung kontra dengan

“Believe”. Jadi, sama-sama memanfaatkan suatu sarana yang mampu menjangkau massa atau penonton secara besar, namun dengan pesan yang berbeda-beda.

Kita juga sudah tahu tentu “Pengkhianatan G 30 S PKI”. Bahkan, harus dipaksakan supaya orang mau menonton. Waktu masih mahasiswa, saya senang tiap kali harus menonton itu. Karena, tidak harus belajar di kelas. Bukan karena suka filmnya. Tapi, itu juga contoh, bahkan ketika material yang sangat doktriner pun, penontonnya bisa memanfaatkannya untuk keperluan yang lain. Misalnya, daripada belajar di kelas, *mending* kita nonton film itu saja.

Nirwansyah:

Terkait retorika dan jargon atau slogan, sejauh mana ketiga hal tersebut membentuk budaya politik kita di Indonesia ini, Prof.?

Manneke Budiman:

Kalau dinyatakan sebagaimana adanya, sebagai suatu pernyataan politik atau suatu forum pidato atau forum kenegaraan, pasti jadi bahan tertawaan dan tidak dipercaya. Pasti setelah itu dihina-hina. Tapi kalau pesan yang sama, retorika yang sama itu dibungkus dengan film, dengan iklan, itu yang justru lebih kena, lebih efektif.

Nirwansyah:

Berarti ada pengalihwahanaan, ya Prof. Bukan sekadar kata-kata, ya?

Manneke Budiman:

Harus. Betul.

Nirwansyah:

Kalau Buya Syafii sendiri kan agak keras memberikan kritik. Buya menyatakan bahwa Pancasila itu cuma dijadikan etalase politik dan

sekarang hanya menjadi retorika para politisi. Itu kan cukup miris juga bahwa Pancasila hanya dijadikan etalase politik serta dikhianati dalam laku. Buya cukup keras memberikan kritik itu.

Manneke Budiman:

Dan bahkan membuat Pancasilanya sendiri kehilangan legitimasi.

Nirwansyah:

Terkait pergeseran bahasa kekuasaan dari era Orde Baru hingga Reformasi, Prof. sendiri melihatnya ada pergeseran tersebut tidak?

Manneke Budiman:

Ada. Ketika Reformasi, ada institusi-institusi demokrasi baru seperti KPK, MK, dan lainnya. Pada tataran bahasa, terjadi hal yang sama. Setelah Reformasi, bahasa kita membawa kosakata-kosakata yang reformis. Demokrasi, kesejahteraan, keadilan, kebebasan pers, itu ada di mulut semua pejabat. Pejabat-pejabat di era Orde Baru, untuk mengucapkan itu pun, mereka harus sangat berhati-hati. Sebab, setelah mengucapkan kata-kata tersebut mereka bisa dipanggil. Tapi di era Reformasi justru sejumlah kata-kata itu diobral.

Perbuatan yang paling otoriter dan represif pun, ketika dijelaskan oleh aparat, bisa menjadi seolah-olah suatu tindakan yang demokratis dengan dalih untuk menciptakan kedamaian, menenangkan orang dari gejolak yang bisa menimbulkan kekerasan lebih besar lagi. Jadi, semuanya memang dibungkus dengan kosakata-kosakata yang demokratis, tetapi sesungguhnya kita sedang melihat bahwa itu digunakan dengan lebih vulgar untuk membenarkan kekuasaan.

Nirwansyah:

Tapi sekarang Prof. sendiri melihat ada kecenderungan atau tidak? Sebagaimana

ungkapan terkenal yang pernah dikatakan oleh Idi Amin bahwa ia menjamin kebebasan berpendapat, tapi tidak bisa menjamin kebebasan setelah berpendapat. Menurut Prof. ada kecenderungan semacam itu tidak di era sekarang?

Manneke Budiman:

Tentu saja. Antara ucapan dan tindakan, kita selalu bisa berharap adanya *gap*, ya. Orang sudah mulai tidak percaya, karena inflasinya, itu-itu saja yang selalu diucap-ucapkan. Tetapi dalam kenyataannya justru yang terjadi adalah tindakan-tindakan represif. Bawa ternyata hal itu tidak sungguh-sungguh menghilangkan kepercayaan orang pada ungkapan-ungkapan yang berorientasi demokrasi, karena hal-hal seperti itu disajikan di dalam bentuk kebudayaan yang populer. Kalau disajikan dalam bentuk pidato pejabat atau pernyataan kapolres, orang langsung skeptis. Tapi begitu disajikan di dalam film, di dalam macam-macam acara TV, orang merasa lebih bisa menerimanya meskipun secara tidak sadar.

Nirwansyah:

Menurut Prof., seberapa impactful pengalihwahanaan hal-hal yang disampaikan tadi ke dalam medium lain seperti film?

Manneke Budiman:

Saya ingin mengatakan dampaknya cukup besar. Tapi, ilmu kita itu sekarang belum punya cara yang paling tepat untuk bisa mengukur dampak yang sangat subjektif dan emosional itu. Tentu saja kita bisa melakukan survei pada penonton dan segala macam. Namun, hasilnya tidak se-eksak sebagaimana orang-orang matematika dalam mengukur suatu fenomena fisik. Dan itu yang membuat kemudian apapun yang kami nyatakan: "oh sangat berdampak" atau "oh kurang berdampak", selalu akan bisa menjadi perdebatan yang tidak ada habis-

habisnya. Persoalannya ilmu sosial-humaniora kan selalu di situ. Tapi, justru itu membuka peluang untuk adanya pandangan berbeda dan sebagainya.

Nirwansyah:

Budaya populer sendiri apakah bisa jadi alat resistensi terhadap kekuasaan atau hegemoni kekuasaan sekarang, Prof.?

Manneke Budiman:

Orang-orang yang putus asa seperti saya, berharap bahwa itu bisa. Tetapi, kalau melihat sejarah, kita juga boleh pesimis, ya. Bawa pada momen-momen tertentu, dia bisa menjadi sesuatu yang membuka mata. Tapi, dia tidak punya cukup daya tahan untuk menjaga atau kemudian men-trigger ini menjadi suatu gerakan resistensi yang masif. Kenapa? Karena, setelah dilepas satu minggu dua minggu, selesai. Digantikan oleh yang lain dan terlupakan - tidak pernah awet. Selalu sifatnya kontingensi, kesementaraannya sangat kuat. Seperti koran atau surat kabar, orang besoknya sudah membaca berita yang lain lagi.

Nirwansyah:

Apa contoh konkretnya - entah itu film, meme, ataupun misalnya musik-, yang menurut Anda cukup reflektif dalam menggoyang narasi-narasi dominan yang ada saat ini di kekuasaan?

Manneke Budiman:

Kita lihat saja misalnya di dunia musik, ya. Ada komunitas-komunitas anak muda yang mengidentifikasi diri sebagai anak punk. Anak-anak muda punk itu sangat alternatif. Mereka sangat resisten terhadap kultur induk tempat orang tuanya berasal. Sempat mengalami tindakan-tindakan yang represif, tetapi kemudian terakomodasi dan terjinakkan. Misalnya, terdapat institusi-



Wawancara Manneke Budiman bersama Nirwansyah di Studio MAARIF Institute

institusi keagamaan yang kemudian mencoba membuat entah itu pesantren yang memang sasarannya adalah anak-anak (punk) ini dengan tujuan supaya mereka kembali ke kehidupan yang mapan, yang normal, dan tidak lagi bertahan pada kultur punk-nya atau pada identitas punk-nya. Itu kita lihat dulu terjadi di Aceh. Ketika melakukan persiapan acara amal, mereka lantas dibubarkan dan ada yang ditangkap. Di sisi lain, ada pula cara yang lebih halus, yaitu munculnya sejumlah pesantren yang khusus menampung mereka. Anak-anak punk ini lalu dihadapkan pada pertanyaan: "Ayo, kamu mau ikut ajaran agama yang tidak berkenan pada hal-hal seperti tato dan sebagainya, atau mau tetap hidup seperti itu?" Jadi, itu merupakan cara yang sangat halus, yang *harmless*. Dan itu proses penjinakan yang juga tidak akan pernah berhenti.

Contoh lain, Citayam Fashion Week. Disambut gegap gempita. Gubernur Anies Baswedan sampai mengajak pejabat dari Uni Eropa atau dari kedutaan asing untuk mengikuti acara dan meniru cara jalannya anak-anak Citayam dengan sama persis. Kemudian diliput di mana-mana dan beberapa hari kemudian digilas oleh Satpol PP.

Nirwansyah:

Terkait soal penjinakan punk, tadi saya teringat ada Tasawuf Underground yang fokus pada gerakan seperti itu juga. Prof. sendiri melihat dinamika kekuasaan Indonesia ini bagaimana dalam kaitannya dengan isu gender, identitas, etnis, ataupun agama?

Manneke Budiman:

Nyaris tidak ada yang berubah sebetulnya, siapa pun rezimnya. Dan tidak akan bisa dilepaskan dari interseksionalitas di antara isu-isu itu: dengan etnisitas, dengan agama. Sekarang mulai masuk dengan orientasi seksual. Ketika orang masih berbisik-bisik tentang itu, masih dipengaruhi oleh narasi: "Oh, jangan bicara tentang SARA dan lain-lain." Pejabat-pejabat publik juga masih sangat berhati-hati. Selalu memilih yang normatif dan aman. Budaya populer lebih berani bereksplorasi dan bereksperimen dengan hal-hal seperti itu.

Nirwansyah:

Hal-hal konkretnya seperti apa itu Prof.? Yang tidak berubah tadi dan soal eksplorasi tadi?

Manneke Budiman:

Kalau kita lihat kenyataannya, misalnya agama masih menjadi persoalan yang sensitif. Jawa Barat itu masih menjadi *hotbed*. Tapi, kita juga melihat adanya sosok-sosok pemimpin yang mulai berani untuk bersikap lebih tegas. Persoalannya sekarang, apakah itu bagian dari pencitraannya atau betul-betul sungguh-sungguh? Sehingga, kalau seperti itu, dia selalu labil kan. Kita tidak akan pernah bisa tahu apakah ini akan ada di situ untuk seterusnya? Atau hanya sementara, lalu nanti kembali lagi ke yang semula?

Orientasi seksual juga begitu. Menjadi sangat kontroversi. Ada desas-desus bahwa di dalam kekuasaan juga ada *kok* yang punya orientasi seksual alternatif. Tetapi, kita juga melihat bahasanya aparat di mana-mana. Belum lama ini, di TNI bahkan panglimanya mengatakan kalau ada LGBT, akan dikeluarkan atau dipecat. Hal-hal seperti itu ya masih terus ada.

Nirwansyah:

Jadi, Prof. Manneke sendiri melihat politik kita hari ini itu apakah inklusif atau justru sebaliknya, eksklusif dan condong pada identitas tertentu?

Manneke Budiman:

Inklusif dari segi etnik. Orang bisa dengan gampang menunjuk: "Ada kok yang Cina". Dari segi agama: "Ada kok yang non-Muslim." Eksklusifnya adalah bahwa mereka elitis. Jadi tidak mendengarkan suara banyak orang, khususnya mereka yang kritis. Kritis karena sangat *concerned* dan ingin menjaga supaya bangsa dan negara ini tidak rusak. Bukan karena mereka sentimen pada penguasanya, tetapi karena mereka di *exclude*. Sikap kekuasaan yang elitis ini adalah siapa pun yang berbicara mengkritik dan menentang mereka (penguasa) adalah lawan. Jadi, ini adalah suatu

titik interseksional yang berbeda, yang lain. Di samping yang *agak-agak* generik seperti seksualitas, agama atau entitas.

Jadi bagi saya, pelajarannya adalah bahwa dia memperlihatkan multietnisitas di dalam kelompoknya yang elitis, memperlihatkan adanya multiagama dalam internal kelompoknya, bahkan mungkin mengakomodasi orang dengan orientasi seksual yang berbeda, tetapi itu tidak menjamin bahwa lalu dia otomatis menjadi inklusif. Dia bisa tetap menjadi sangat eksklusif dan elitis.

Nirwansyah:

Terkait etika kekuasaan. Kira-kira apa rumusan etika kekuasaan yang perlu diperhatikan oleh para politisi khususnya yang muda-muda maupun para aktivis?

Manneke Budiman:

Anak-anak muda ini dibentuk oleh lingkungan sosial dan sistem pendidikan yang memang tidak mendorong terjadinya pendewasaan secara etika. Mereka selalu belajar bahwa apa pun itu boleh, asal mereka tahu cara melakukannya dengan benar. UN (ujian nasional), misalnya. Tidak apa-apa menyontek, yang penting lulus. Ketika kemudian ada yang membongkar, malah yang membongkar justru dizalimi *name-name*. Jadi, mereka difasilitasi dengan berbagai macam hal yang bisa membuat mereka menjadi sangat pintar, wawasannya sangat bagus. Tetapi, bahkan sampai pendidikan tinggi pun, tidak ada yang namanya etika. Tidak ada yang secara khusus mengajarkannya, kecuali jurusan filsafat. Itu pun dipelajari sebagai ilmu, bukan sebagai bagian dari pembentukan kepribadian atau karakter.

Jadi memang di dalam pendidikan orang muda, saya sendiri sebagai pendidik melihat ada semacam kegagalan nasional untuk

menanamkan etika. Dan bagaimana cara menanamkannya? Kita tidak tahu. Yang paling tepat atau paling ideal adalah melalui orang-orang yang bertanggung jawab pada pendidikan anak muda itu: dosen, guru, orang tua, serta orang-orang yang dihormati. Pada saat yang sama, setiap hari kita melihat berita-berita yang sangat miris sekali tentang kelakuan tak terpuji tokoh-tokoh atau sosok-sosok panutan ini. Maka, tidak heran kalau ada yang mengaku pejuang reformasi tahun '98 tiba-tiba dengan sangat mudah bisa menjustifikasi dirinya dengan nyaman sebagai bagian dari kekuasaan pada saat ini. Yang sangat *getol* di mana-mana memperjuangkan toleransi, kerukunan beragama, perlindungan terhadap minoritas, tapi juga tanpa ragu dan tanpa konflik batin, mau masuk menjadi bagian dari kekuasaan yang masih mempraktikkan hal-hal yang tidak toleran dan tidak demokratis.

Nirwansyah:

Peran para intelektual atau akademisi kayaknya telah terjadi semacam deintelektualisasi. Kira-kira bagaimana cara kita untuk - katakanlah yang tidak bisa memberhentikannya, namun kemungkinan bisa memperlambat hal itu?

Maneke Budiman:

Bagi orang yang setiap hari di universitas, Senin sampai Jum'at. Itu pertanyaan yang bisa menimbulkan pesimisme luar biasa. Ada satu-dua orang yang masih terus-menerus menyuarakan. Namun, tak jarang mereka dijadikan lawan dan dimusuhi oleh habitatnya sendiri. Jangankan oleh orang di luar (oleh kekuasaan), di dalam tempatnya sendiri dianggap sebagai *troublemaker*, sebagai tukang ribut. Sehingga, ini kemudian menjadi suara-suara yang sepi, yang sendirian, marjin (terpinggirkan), dan mereka tidak punya efek yang cukup kuat untuk bisa membawa perubahan. Saya bahkan terpikir, jangan-

jangan cara yang paling efektif itu yang dilakukan Rocky Gerung selama ini. Dia tidak menggunakan ruang-ruang kelas, melainkan memilih forum-forum sosial yang terbuka untuk melontarkan ide-ide—kita boleh menganggap gila. Tapi, itu sebuah *challenge*—menantang orang untuk berpikir.

Beda dengan orang lain yang meninabobokan, yang berusaha meyakinkan orang bahwa saya benar dan sebagainya. Rocky itu—ini saya bukan mau mempromosikan dia—tanpa beban. Tidak semua orang percaya pada dia. Namun orang melihat bahwa dia mengajak kita berpikir dengan cara yang berbeda *tatkala* kita sedang pelan-pelan terseret ke dalam *mainstream*. Maka, jangan-jangan para intelektual, para dosen, akademisi yang selalu ada di kampus Senin sampai Jum'at, mesti mulai turun ke bumi. Bertemu dengan berbagai kelompok, dan ada di mana-mana. Memindahkan pengajaran yang eksklusif dan elitis di kelas ke luar dengan bahasa yang dia masih harus terus cari. Pekerjaan rumahnya adalah bagaimana para intelektual, para dosen, akademisi itu bisa berbicara tentang hal-hal yang abstrak kepada banyak orang selain kalangan kampus. Kalau itu terjadi, kita punya harapan yang besar. Tapi, jangan lagi berharap pada pendidikan tinggi sebagai institusi untuk melakukan hal itu.

Nirwansyah:

Kalau civil society sendiri Prof., kira-kira bagaimana bisa berkontribusi atau berperan untuk membangun budaya politik kita yang lebih mantap?

Maneke Budiman:

Saya masih melihat kita belum betul-betul punya tradisi *civil society* yang mampu dan cukup kuat atau cukup bisa bertahan lama untuk berhadapan dengan *political society*,

yaitu negara dengan institusi-institusinya. Jadi, ketika tiba-tiba ada RUU TNI, RUU Kejaksaan, RUU Polri, RUU Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital), suara teman-teman ini nyaris kelihatan seperti orang yang berusaha berteriak-teriak di dalam hutan. Sementara yang memiliki telinga tidak berhasil menangkap suara itu, karena *corong political society* atau negara jauh lebih keras seperti *sound horeg*. Mengalahkan yang lain-lain. Bukan berarti tidak ada dan tidak berbunyi. Tapi, suaranya tenggelam oleh *loud speaker*-nya *political society* yang memang sangat dominan. Apa yang harus dilakukan? Dibangun terus. Lagi-lagi, siapa yang akan jadi tumpuan kita? Ya, anak-anak muda itu.

Terdapat hal yang cukup menakjubkan pada saat reformasi dulu. Pun, kemarin ketika ada demonstrasi menolak RUU TNI. Bawa orang-orang muda yang dari kecil sampai belasan tahun diindoktrinasi dengan kepatuhan terhadap negara bahwasanya tidak ada alternatif lain bagi kebenaran selain yang berasal dari pemerintah. Di luar itu, semua penjahat. Kok mereka, anak-anak muda ini tetap bisa kemudian memprakarsai Reformasi '98? Mereka belajar dari mana, ya? Padahal ketika di kelas, di sekolah, dan di rumah, mereka diajarkan untuk tunduk, menerima. Dari mana mereka belajar melawan?

Saya bilang, kuncinya adalah di dalam usia mudanya yang berani untuk menempuh *adventure*. Meskipun mungkin gagal, kesandung, jatuh, dan sebagainya. Dan lagi-lagi, kemarin ketika Indonesia Gelap, muncul lagi anak-anak muda ini yang juga didoktrinasi dengan cara yang sangat *rigid*. Tetapi, dari mana mereka belajar menolak? Artinya ada DNA, ada suatu bawaan tertentu di dalam usia muda. Yang namanya usia muda, itu masa orang untuk bertanya, untuk tidak menerima apa pun, termasuk yang tampaknya

bagus. Masa ini tidak panjang. Setelah itu, mereka akan cari kerja, cari kemapanan, dan sebagainya. Tapi, pada masa-masa tersebut, di situlah *civil society* bisa subur kalau orang-orang muda ini bisa *digalang* sebagai unsur *civil society*.

Kelemahannya, sifatnya temporer. Berarti apa? Setiap kali generasi ini lewat, dan kemudian mereka beralih mencari kemapanan, orang muda yang berikutnya harus dibangun lagi. Maka dari itu, BEM di universitas punya peran yang sangat besar, karena menjadi ruang untuk melakukan kaderisasi. Bukan untuk melakukan latihan militer di barak.

Nirwansyah:

Apakah Anda optimis melihat perkembangan budaya politik kita saat ini?

Manneke Budiman:

Saya tidak melihat adanya kemungkinan budaya politik yang akan berbeda dari sebelum-sebelumnya. Memang akan selalu seperti ini. Karena bagaimanapun, kebudayaan itu adalah instrumen yang dicomot: apa yang berguna pada suatu saat, akan dipakai. Sebaliknya, yang tidak berguna, tidak akan dipakai. Kebudayaan itu membiarkan dirinya seluas mungkin. Maka, sering kali persoalannya adalah bukan pada budayanya, tetapi pada politiknya. Yang populis akan mencomot apa dari kebudayaan, yang otoritarian akan mencomot apa, dan yang nasionalis-religius akan mencomot apa. Hal itu tidak bisa dihindarkan dan tidak perlu kita cegah. Mereka bisa memanfaatkan media sosial, media komunikasi, media massa untuk betul-betul menyampaikan itu semua. Dan inilah yang terjadi dengan bansos (bantuan sosial) dan segala macam iming-iming itu.

Tapi, orang-orang yang bekerja di dalam kebudayaan, seperti kaum intelektual yang ada

di Institut seperti ini, yang ada di universitas, tidak boleh pernah berhenti melakukan kritik kebudayaan.

Nirwansyah:

Saya teringat Buya Syafii Maarif yang pernah mengatakan bahwa para politisi itu harus disiram dengan seni, karena mereka kering. Jadi, sastrawan-sastrawan ataupun seniman-seniman mesti turun gunung dan bahkan memberikan kuliah di parpol-parpol agar seni itu menjadi bagian dari jiwa mereka.

Manneke Budiman:

Cilakanya, setelah para seniman-sastrawan turun gunung bertemu mereka, malah hanyut ikut menjadi bagian dari mereka. Entah itu jadi komisaris dan sebagainya. Jadi, lebih tidak kuat mentalnya. Sehingga, akhirnya terbawa arus.

Nirwansyah:

Rendra sering mempromosikan budaya politik maritim ala Bung Hatta dan sangat menentang budaya feodal atau pedalaman. Dalam pandangan Prof. kira-kira budaya politik kita saat ini lebih cenderung ke mana? Maritim atau pedalaman?

Manneke Budiman:

Lebih cenderung ke “masuk angin – pagi tempe, sore kedelai”. Jadi, kadang maritim, kadang kontinental. Sekarang ini sedang digalak-galakkan wacana bahwa kita itu sebetulnya akar budayanya akar budaya maritim. Saya tidak menolak gagasan itu. Tapi, kalau kita mau belajar kritis, kita harus bertanya: “Dari mana datangnya cerita seperti itu? Apa karena kita negara kepulauan?” Iya betul. Tapi, jangan-jangan maritim kita itu adalah maritim dari pulau ke pulau. Maritimnya orang-orang Eropa itu penjelajahan samudera.

Jadi, jangan hanya karena mau mencoba mencari alternatif kejayaan masa lalu yang berbeda, kemudian kita juga terjebak pada kepalsuan yang sama. “Apakah betul ada kebudayaan maritim? Oh, sampai ke Halmahera, sampai ke Madagaskar.” Iya, itu karena kesasar. Bukan sesuatu yang *by design*. Hal-hal seperti ini yang, menurut saya, dengan *random* dipungut. Karena memang pada suatu saat, itu menguntungkan bagi pemungutnya.

Sekarang, Menteri Kebudayaan menyatakan bahwa Indonesia merupakan kebudayaan tertua di dunia, karena ditemukan fosil kerangka yang usianya dianggap sangat tua. Tiga hari yang lalu, saya di Manila dan pergi ke museum antropologi. Mereka menemukan tulang-tulang hewan dari 901 ribu tahun yang lalu. Mereka menemukan irisan-irisian pada tulang itu yang hanya mungkin dibuat oleh suatu alat yang tajam dan dengan tangan manusia untuk mengambil sumsum. Jadi, bangsa lain juga melakukan klaim yang sama. Buat apa kita beradu klaim seperti itu. Secara *random*, hal-hal semacam ini sering kali diambil begitu saja karena memberikan *sense of grandeur* - rasa kebesaran yang sebetulnya palsu dan kosong.

Nirwansyah:

Bagaimana Anda melihat perkembangan atau dinamika budaya politik di era digital dalam konteks Indonesia akhir-akhir ini dengan munculnya gelombang massa berskala masif yang turun ke jalan-jalan di berbagai daerah?

Manneke Budiman:

Kita melihat mobilisasi gerakan dapat dilakukan dengan cepat dan masif melalui medsos (media sosial). Tapi kita tetap harus kritis dan tidak boleh terjebak dalam euforia: “Benarkah medsos telah menciptakan suatu jenis komunitas baru yang bersifat virtual

dan melahirkan suatu gerakan perlawanan? Ataukah pada saat yang sama kita juga sedang “dimanfaatkan” segelintir elite yang menguasai jejaring dan platform-platform medsos?” Karena kelompok-kelompok yang sejatinya non-demokratis dan anti-demokrasi menggunakan medsos yang sama untuk menyesatkan kita, mengalihkan perhatian kita dari isu-isu utama, atau memprovokasi kita untuk melakukan aksi-aksi yang justru melemahkan prinsip-prinsip gerakan perlawanan sendiri. Selain itu, kecepatan *viral* suatu seruan atau dorongan untuk bergerak yang dimiliki medsos juga menyebabkan fokus kita terpecah pada terlalu banyak isu, dan itu menyebabkan berbagai kelompok kritis sulit beraliansi sebab semua asyik dan sibuk dengan agenda masing-masing.

Lihat saja, ada banyak sekali seruan dari macam-macam kelompok yang ditujukan pada pemerintah. Saking banyaknya, sehingga jangan-jangan jadi mustahil untuk bisa diwujudkan. Tidak ada koordinasi, tidak ada platform gerakan bersama, walaupun skalanya masif dan teriakannya lantang.

Nirwansyah:

Di tengah politik yang lintang pukang ini Prof., kita ini kehilangan sosok-sosok yang menjadi penjaga moral, penjaga kewarasan publik. Terus apa yang mesti kita lakukan di tengah kekosongan itu?

Manneke Budiman:

Menciptakan sosok-sosok yang baru.

Nirwansyah:

Caranya, Prof.?

Manneke Budiman:

Caranya melalui proses-proses yang jatuh-bangun yang tadi kita bicarakan. Mungkin

ada seribu orang yang bergerak. Dua tahun kemudian mereka hilang semua. Tapi dari seribu itu, ada satu-dua saja yang bisa menjadi sosok seperti Buya atau jadi penggantinya Romo Magnis. Bagi saya, itu merupakan suatu langkah optimal di dalam situasi seperti ini yang bisa kita upayakan. Saya selalu percaya bahwa suatu gerakan itu tidak harus mengandalkan kuantitas. Kalau suara itu cukup didengar dan betul-betul bisa diterima karena kemurnian dan keluhurannya, dia bisa mempengaruhi banyak orang. Tapi, memang kita harus menyediakan banyak corong untuk mereka. Tidak mungkin disediakan oleh pemerintah. Bisa dengan universitas lewat berbagai macam forum ilmiah, institut-institut di luar atau non-universitas.

Lagi-lagi, dengan segala keterbatasan, karena tidak banyak jumlahnya. Sebab, universitasnya sekarang terkooptasi semua.

Tapi kita tidak boleh berhenti. Sebagaimana pesan yang ada di “Dead Poet Society”: “Daripada saya harus menyerah pada kehidupan seperti ini, lebih baik saya tidak usah ada di dunia ini. Saya mati pun mungkin masih lebih baik.” Intinya ialah terus semangat untuk tidak pernah menyerah pada penundukan atau penjinakan oleh kekuasaan dominan.

Nirwansyah:

Boleh kasih quote-nya Prof. yang menggugah sekaligus menggugat terkait tema kita tentang budaya politik Indonesia saat ini?

Manneke Budiman:

Budaya politik Indonesia sangat luwes, sangat cair. Tidak mudah untuk diberi “patok” baik atau tidak, luhur atau rendah karena sering kali yang membuat dia seperti itu adalah kekuasaan yang menyalahgunakannya. Tapi, kita bisa tetap menjaga suatu budaya politik yang positif

bagi keseluruhan bangsa. Pada suatu momen tertentu, dia punya fungsi eksistensial untuk menyelamatkan suatu bangsa dari kehancuran. Sangat abstrak. Orang harus berpikir ekstra. Saya tidak tahu apakah penjelasan ini bisa membuat orang paham atau tidak. Tapi itu.

Nirwansyah:

Terima kasih, Profesor Manneke Budiman yang telah memberikan dan menyampaikan gagasannya tentang budaya politik kita saat ini.

